

Analisis Pengendalian Internal terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Kredit Yasa Griya Berdasarkan SEOJK NO.35/SEOJK.03/2017 di BTN Syariah Cabang Cirebon

Ikrimah Syarah Fauziah*, Nanik Eprianti, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ikrimahsyarahf@gmail.com, NanikEprianti@gmail.com , lizadzulhijjah@yahoo.co.id

Abstract. Banks are one solution to the economic problems that exist in society, one of their functions is as a provider of financing. Bank BTN Syariah Cirebon Branch has the Musyarakah Construction Yasa Griya financing product with the highest NPF level every year. This research aims to understand how the implementation and internal controls at BTN Syariah Cirebon branch are in accordance with the principles of SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. This research uses a normative-empirical approach in qualitative research with data sources from primary and secondary data through interviews, literature studies and documentation studies. The research results show that BTN Syariah Cirebon Branch has almost implemented the 5 components of the internal control system with SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Even though internal controls are running well, BTN Syariah Cirebon Branch still faces the problem of high NPF on KYG products that use Musyarakah contracts. Risk mitigation efforts, which are one part of the internal control principles, namely risk identification and assessment based on SEOJK No.35/SEOJK.03/2017, are not yet fully comprehensive, especially in anticipating external risks that can affect the quality of financing.

Keywords: *Internal Control System, Problem Financing, Musyarakah Agreement.*

Abstrak. Bank merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat salah satu fungsinya sebagai pemberi pembiayaan, pada Bank BTN Syariah Cabang Cirebon memiliki produk pembiayaan Musyarakah Konstruksi Yasa Griya yang tingkat NPFnya paling tinggi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan serta pengendalian internal yang ada di BTN Syariah cabang Cirebon apakah sudah sesuai dengan prinsip SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam penelitian kualitatif dengan sumber data dari data primer dan sekunder melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTN Syariah Cabang Cirebon telah hampir mengimplementasikan ke-5 komponen sistem pengendalian internal dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017. Meskipun pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, BTN Syariah Cabang Cirebon masih menghadapi masalah tingginya NPF pada produk KYG yang menggunakan akad Musyarakah. Upaya mitigasi risiko yang merupakan salah satu bagian dari prinsip pengendalian internal yaitu identifikasi dan penilaian risiko berdasarkan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017, belum sepenuhnya komprehensif, terutama dalam mengantisipasi risiko-risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Pembiayaan Bermasalah, Akad Musyarakah.*

A. Pendahuluan

Bank merupakan solusi permasalahan perekonomian masyarakat karena merupakan tempat yang aman untuk menyimpan uang. Masyarakat kemudian menerima manfaat berupa bagi hasil. Bank berperan sebagai lembaga (perantara) yang menghimpun uang (pinjaman), menyalurkan uang (meminjamkan), dan menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan uang dan pihak yang tidak mempunyai cukup uang.

BTN Syariah merupakan unit bisnis strategis dari BTN Konvensional dan menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip Syariah. Tujuan dibukanya BTN Syariah adalah untuk turut berkontribusi terhadap tingginya minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran akan manfaat prinsip perbankan syariah.

BTN Syariah menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan komersial, seperti Kredit Pemilikan Rumah atau disingkat KPR yang terdiri dari pembiayaan subsidi dan non subsidi, lalu ada pembiayaan Non KPR yang terdiri dari pembiayaan multimanfaat dan multijasa, dan ada pula produk pembiayaan Konstruksi Kredit Yasa Griya atau disingkat KYG yang terdiri dari Pembiayaan konstruksi dan Pembiayaan Pemilikan Lahan atau yang disingkat PPL, dan yang terakhir pembiayaan Non KYG yang terdiri dari modal kerja dan juga investasi.

Produk pembiayaan konstruksi BTN Syariah Cirebon disebut dengan Kredit Yasa Griya atau disingkat atau KYG BTN, produk ini membantu developer mendapat kredit modal kerja untuk membiayai pembangunan proyek residensial, mulai dari biaya konstruksi hingga biaya penyelesaian dan infrastruktur.

praktik jual beli telah mengalami perkembangan. Salah satu contohnya adalah praktik jual beli rambut manusia yang masih dilakukan oleh masyarakat, terutama di salon kecantikan di wilayah Kecamatan Margaasih. Rambut manusia tersebut kemudian digunakan untuk membuat wig, sanggul, atau hair extensions.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad musyarakah (perjanjian kerjasama). Akad musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan antara para pemilik modal dari para mitra musyarakah, yang mana mereka menyatukan modalnya dan bersama-sama menjalankan usaha dalam kemitraan dengan tingkat bagi hasil sesuai kesepakatan, dan menanggung kerugian sesuai dengan jumlah yang ditanamkan beban.

Syirkah adalah akad yang dianjurkan. Hal ini mengacu pada dalil Al-Quran, Hadits Al-Quran, atau Ijmaa. Dalam dalil yang memungkinkan terjadinya perjanjian syirkah yaitu ada dalam Qur'an surah Shad (38):24 yang artinya "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk lembaga bernama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang bertugas mengeluarkan fatwa. Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah diatur dalam nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pinjaman yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu proyek tertentu. Masing-masing pihak berkontribusi dengan pemahaman bahwa meskipun manfaat akan dibagi secara proporsional atau sesuai rasio yang disepakati, namun risiko juga akan ditanggung secara proporsional.

Produk pembiayaan KYG ini tidak terlepas dari banyaknya kasus pembiayaan bermasalah, Upaya yang harus dilakukan agar mencegah terjadinya potensi pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan adanya pengendalian internal. Pengendalian internal adalah perlindungan terhadap kekayaan dan harta benda suatu perusahaan dari penyalahgunaan segala bentuk ancaman dan menjamin ditaatinya segala peraturan (aturan) hukum serangkaian kebijakan dan prosedur untuk melindungi organisasi. dan pedoman manajemen diikuti atau diterapkan dengan baik oleh seluruh karyawan perusahaan. Asalkan terdapat sistem pengendalian internal yang baik, diharapkan dapat diatur dengan aturan dan tidak melanggar Standar Operasional Prosedur atau SOP sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi dengan baik bukan malah sebaliknya.

Sistem pengendalian internal yang efektif diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 dan memiliki 5 komponen utama: 1) Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian. 2) Identifikasi dan penilaian risiko, 3) Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. 4) Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi dan 5) kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Bank harus dapat mendeteksi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah sejak awal sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian dari banyaknya pembiayaan bermasalah. Pada pembiayaan KYG di Bank BTN Syariah cabang Cirebon terdapat NPF yang tinggi selama 3 tahun terakhir yaitu pada 2021 sebesar 36.65%, pada tahun 2022 sebesar 35.44%, dan pada tahun 2023/agustus sebesar 26.63% produk pinjaman KYG BTN Syariah Cabang Cirebon mempunyai persentase status non-performing loan (NPF) tertinggi diantara produk lainnya. Selain itu terdapat pula indikasi konflik internal antar pengurus, tidak adanya tim marketing dan sub kontraktor yang kompeten di BTN syariah Cabang Cirebon.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Ronny Indra dengan judul “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi NPF pada BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung” memberikan dasar yang relevan untuk penelitian ini. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa tingginya Non-Performing Financing (NPF) disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya supervisi dan pengawasan terhadap kinerja nasabah oleh BRI Syariah KCI Citarum Bandung. Sementara itu, faktor eksternal terkait dengan ketidakstabilan situasi politik dalam negeri, terutama menjelang Pilpres 2019, yang memengaruhi kebijakan ekonomi makro dan berdampak negatif pada sektor ekonomi mikro, basis usaha bagi banyak nasabah BRI Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengendalian internal di BTN Syariah cabang Cirebon diterapkan dalam mengelola produk pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah konstruksi Kredit Yasa Griya?”, “Bagaimana analisis pengendalian internal di BTN Syariah cabang Cirebon pada produk pembiayaan musyarakah konstruksi Kredit Yasa Griya berdasarkan SEOJK No.35.03/2017?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal di BTN Syariah cabang Cirebon diterapkan dalam mengelola produk pembiayaan khususnya pembiayaan Musyarakah konstruksi Kredit Yasa Griya.
2. Untuk mengetahui analisis pengendalian internal di BTN Syariah cabang Cirebon pada produk pembiayaan musyarakah konstruksi Kredit Yasa Griya dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara langsung kepada pejabat BTN Syariah cabang Cirebon mengenai penerapan sistem pengendalian intern dalam pembiayaan Musyarakah Konstruksi Kredit Yasa Griya dan Peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dari BTN Syariah cabang Cirebon untuk mendukung penelitian ini. data sekunder merupakan data yang di dapat bukan dari sumber pertama langsung melainkan berasal dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah seperti jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Pengendalian Internal di BTN Syariah Cabang Cirebon dalam Pengelolaan Produk Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Kredit Yasa Griya

Direksi dan Dewan Komisaris berperan dalam pengendalian internal dalam melakukan pengawasan dan menerapkan budaya pengendalian secara signifikan. Tidak hanya menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pengawasan operasional. Hasil wawancara peneliti dengan lima informan dari BTN Syariah Cabang Cirebon juga mengungkapkan bahwa adanya limitasi kewenangan dalam transaksi, di mana transaksi di cabang dibatasi hingga Rp10 miliar dan selebihnya menjadi wewenang direksi di kantor pusat.

Selain itu, terdapat "check point" mingguan yang dilakukan oleh karyawan dan dilaporkan ke kantor pusat untuk memantau kinerja dan keuangan cabang, sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.

Struktur organisasi terkini sudah terdokumentasi, jalur kewenangan yang jelas, dan tanggung jawab pelaporan yang rinci juga diterapkan BTN Syariah Cirebon. Dengan demikian, potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan, tumpang tindih tanggung jawab dapat dihindari, dan setiap individu dapat bekerja secara optimal sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Budaya pengendalian di BTN Syariah Cirebon dilakukan dengan cara menghimbau karyawan untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga efektivitas sistem pengendalian internal melalui pelaporan masalah dan potensi risiko. Kesadaran akan pentingnya pengendalian internal terus ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi rutin. Praktik rotasi karyawan setiap 5 tahun dan program pengembangan kompetensi turut memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi berkala dan tindakan korektif yang diambil berdasarkan temuan menunjukkan komitmen bank untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian internal.

Identifikasi dan Penilaian Resiko dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dalam ekonomi syariah melalui beberapa cara. Setiap tiga bulan, pengisian formulir RCSA (Risk Control Self-Assessment) dilakukan oleh karyawan untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam proses bisnis, seperti risiko pencurian dan pembobolan ATM, termasuk dampaknya dan penyebabnya. Selain itu, mereka mengisi LED (Loss Event Data), yang mencatat risiko yang sudah terjadi berdasarkan perkiraan yang tertulis dalam RCSA. Informasi dari RCSA dan LED dirangkum dalam KRI (Key Risk Indicator) untuk mengidentifikasi risiko di masa mendatang. Manajemen bank juga menganalisis resiko dengan menggunakan metode four eyes principle, dan 5C (character, capacity, capital, condition, collateral). Kedua prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk menerima persetujuan kredit calon debitur.

Pemisahan fungsi yang jelas pada BTN Syariah Cabang Cirebon sudah dilakukan antara bagian kredit, operasional, dan keuangan sebagai upaya untuk mencegah konflik kepentingan dan potensi kecurangan. Setiap bagian memiliki tanggung jawab dan wewenang yang spesifik, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam hal otorisasi transaksi, setiap transaksi harus melalui proses persetujuan yang melibatkan beberapa pihak. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi telah dievaluasi dengan cermat dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Verifikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengamanan aset dan data juga sudah dilakukan melalui pembatasan akses email, penggunaan watermark pada dokumen, serta pemblokiran akses USB merupakan beberapa langkah yang diambil untuk melindungi informasi sensitif dari pihak yang tidak berwenang. Selain itu, penggunaan email perusahaan sebagai satu-satunya saluran komunikasi resmi antar karyawan juga membantu dalam memantau dan mengendalikan arus informasi.

Pengecekan independen secara rutin dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pemberian pembiayaan dan penerimaan kas. Proses ini melibatkan verifikasi terhadap setiap transaksi pembiayaan untuk memastikan bahwa jumlah yang diberikan sesuai dengan data penerimaan kas yang tercatat. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

Sistem akuntansi di BTN Syariah Cabang Cirebon telah terintegrasi dengan baik, mampu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan setiap transaksi keuangan secara akurat dan real-time. Hal ini didukung oleh penggunaan teknologi modern yang memungkinkan otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manusia. Rekonsiliasi data juga dilakukan secara berkala setiap bulannya, untuk memastikan kesesuaian antara catatan akuntansi dengan saldo riil di rekening. Proses rekonsiliasi ini melibatkan pemeriksaan terhadap setiap transaksi yang belum tercatat di akhir bulan, sehingga memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan tidak ada yang terlewat. Selain itu, bank juga telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi

kepada nasabah dan pihak terkait lainnya. Call center, media sosial, dan website digunakan secara efektif untuk memberikan informasi tentang produk dan layanan, serta menjawab pertanyaan atau keluhan dari nasabah.

Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan di BTN Syariah Cabang Cirebon menjadi bagian integral dalam menjaga efektivitas sistem pengendalian internal. Bank melakukan pemantauan terhadap seluruh aspek operasional untuk mengidentifikasi potensi risiko dan penyimpangan. Pemantauan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk laporan rutin yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, tinjauan manajemen berkala, serta laporan khusus terkait penyimpangan yang terdeteksi. Laporan-laporan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja bank, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal. Manajemen BTN Syariah Cabang Cirebon juga sudah secara aktif menindaklanjuti setiap laporan dan temuan yang dihasilkan dari proses pemantauan. Tindakan koreksi dilakukan dengan segera untuk mengatasi setiap penyimpangan yang ditemukan, baik yang berasal dari laporan internal maupun dari auditor eksternal. Hal ini menunjukkan komitmen bank untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Salah satu contoh dari kegiatan pemantauan adalah pelaksanaan cash opname setiap hari dan root cause analysis setiap bulan. Cash opname bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas fisik dengan catatan akuntansi, sedangkan root cause analysis dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari setiap masalah yang terjadi, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan yang tepat.

Selain itu, adanya pengkajian ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk pemantauan juga menunjukkan keseriusan bank dalam menjaga kualitas pengendalian internal. Proses pengkajian ulang ini memastikan bahwa setiap temuan atau masalah telah ditangani dengan baik dan tidak terulang di masa mendatang.

Analisis Pengendalian Internal Di BTN Syariah Cabang Cirebon Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Kredit Yasa Griya Dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017.

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan, hal ini sudah ada aturan yang berlaku yaitu SEOJK No.35/SEOJK.03/2017.

Berdasarkan hasil wawancara, BTN Syariah Cabang Cirebon telah berusaha menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan pengendalian internal melalui berbagai langkah konkret. Kebijakan dan prosedur yang jelas telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan efektif di seluruh tingkatan manajemen. Struktur organisasi yang jelas, rotasi karyawan, dan pelatihan berkala memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi di seluruh lini.

Identifikasi dan penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan, termasuk analisis 5C dan IYL, serta pemantauan KRI. Potensi penipuan juga menjadi perhatian utama dalam penilaian risiko. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui laporan berkala, otorisasi transaksi, verifikasi data, dan pemisahan fungsi yang jelas. Rekonsiliasi data dan sistem eskalasi masalah juga diterapkan untuk memastikan akurasi dan efektivitas pengendalian.

Pemantauan dan evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dilakukan secara rutin, termasuk melalui cash opname harian dan root cause analysis bulanan. Manajemen juga menindaklanjuti laporan kelemahan dalam pengendalian internal. Secara keseluruhan, penerapan pengendalian internal di BTN Syariah Cabang Cirebon menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga keamanan, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam operasionalnya. SOP pengendalian internal bank pada BAB IV Penerapan pengendalian resiko yang terdapat dalam Kebijakan Umum tentang Manajemen Resiko juga sudah sejalan dengan lima prinsip pengendalian internal SEOJK No.35/SEOJK.03/2017.

Pengendalian internal oleh manajemen BTN Syariah Cabang Cirebon, menunjukkan praktik yang cukup baik dan sesuai dengan empat dari lima prinsip-prinsip dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menjadi dasar dari SEOJK No. 35/POJK.03/2017 sendiri. Hal ini tercermin dalam dokumen Kebijakan Manajemen Risiko yang dikeluarkan oleh BTN, yang secara khusus membahas penerapan pengendalian internal sebagai bagian integral dari manajemen risiko secara keseluruhan. Aspek yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini yaitu tingginya Non- Performing Financing (NPF). Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor yang menyebabkan tingkat NPF yang tinggi antara lain, karakter nasabah yang kurang baik dalam mengelola keuangan, konflik internal developer, kurangnya kompetensi tim marketing dan subkontraktor, serta kurangnya transparansi terkait kondisi keuangan pengembang. Kondisi ekonomi yang memburuk dan kegagalan pasar properti juga turut mempengaruhi tingginya NPF. Keterangan informan pada saat wawancara juga menyatakan bahwa konsentrasi produk konstruksi KYG mencapai hampir 99% dari total portofolio pembiayaan konstruksi bank. Kondisi ini menimbulkan risiko konsentrasi yang signifikan. Jika terjadi penurunan pada sektor properti atau konstruksi, seperti perlambatan ekonomi, kenaikan suku bunga, atau perubahan regulasi, dampaknya akan sangat signifikan bagi nasabah dan menurunkan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran KYG. Hal ini lah yang mengakibatkan tingginya tingkat NPF produk tersebut dan berdampak buruk bagi bank.

Seharusnya, bank mampu menganalisis dan mengantisipasi risiko-risiko ini secara menyeluruh sebelum memberikan persetujuan terhadap pinjaman KYG kepada nasabah. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang akan terjadi dari tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi pada produk KYG, menunjukkan terdapat kelemahan dalam proses pengendalian internal yang diterapkan manajemen. Hal ini juga mengindikasikan bahwa komponen identifikasi dan penilaian risiko yang merupakan salah satu komponen pengendalian internal yang baik berdasarkan SEOJK No. 35, belum sepenuhnya diterapkan BTN Syariah Cabang Cirebon secara komprehensif.

SEOJK No. 35 Tahun 2017 mengamanatkan menekankan penilaian risiko yang komprehensif, termasuk risiko pasar yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif). Oleh karena itu, BTN Syariah Cabang Cirebon perlu melakukan identifikasi dan penilaian risiko pasar yang lebih komprehensif dengan mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan membuat profil risiko pasar, serta memutuskan untuk mengambil risiko pasar tersebut atau tidak. Penilaian Risiko tersebut harus mencakup semua Risiko yang dihadapi, baik Risiko individual maupun secara keseluruhan (aggregate), yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Khusus untuk Bank Umum Syariah ditambahkan Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Jika BTN Syariah melaksanakan identifikasi dan penilaian risiko secara maksimal, kemungkinan angka Non-Performing Financing (NPF) pada produk Kredit Yasa Griya (KYG) dapat diminimalisir. Identifikasi risiko yang efektif meliputi evaluasi menyeluruh terhadap risiko kredit, kondisi pasar, dan operasional. Penilaian risiko ini menghasilkan profil risiko yang akan dapat membantu memahami potensi risiko terhadap portofolio pembiayaan. Seperti pada firman Allah SWT pada Qur'an Surat Al-Mujadalah Ayat 7 yang artinya "Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". Pengendalian (control) bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) pada bab dua penelitian ini, yang menetapkan lima komponen utama sistem pengendalian internal. Salah satu komponen tersebut adalah penilaian risiko. Sesuai dengan prinsip ini,

BTN Syariah Cabang Cirebon seharusnya melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat membebani perusahaan. Hal ini termasuk faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka Non-Performing Financing (NPF) pada produk konstruksi KYG, seperti yang dikemukakan oleh informan, serta menentukan tindakan mitigasi yang sesuai untuk mengatasi risiko tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan pengendalian internal di BTN Syariah Cabang Cirebon dalam SOP terdapat 5 point (1) Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian, (2) Identifikasi dan penilaian risiko, (3) Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, (4) Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi, dan (5) Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan. yang juga telah diadopsi oleh BTN dengan mengeluarkan SOP Pengendalian Kebijakan Umum Tentang Manajemen Risiko, manajemen telah menerapkan empat diantaranya secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan yakni terdapat limitasi transaksi, serta budaya pengendalian yang kuat di kalangan karyawan. Selain itu, manajemen juga telah menerapkan berbagai prosedur dan mekanisme pengendalian seperti pemisahan fungsi, verifikasi, pengamanan aset dan data, sistem akuntansi yang terintegrasi, serta kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.
2. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 terdapat 5 komponen namun pengendalian internal oleh BTN Syariah Cabang Cirebon pada produk pembiayaan konstruksi KYG belum sepenuhnya efektif, terutama dalam komponen ke 2 yaitu identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat Non-Performing Financing (NPF) pada produk tersebut. Tingginya NPF mengindikasikan adanya kelemahan manajemen bank dalam mengidentifikasi dan menilai risiko, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan pasar properti yang tidak stabil dapat mengurangi kemampuan nasabah untuk membayar angsuran, sehingga berkontribusi langsung terhadap tingginya NPF. Selain itu, faktor internal berupa kurang efektifnya penerapan manajemen risiko oleh bank dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak risiko eksternal tersebut juga turut memperburuk situasi. Meskipun manajemen bank mengklaim telah melakukan upaya terbaik, fakta tingginya tingkat NPF pada produk pembiayaan KYG menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan pengendalian internal bank, khususnya pada aspek identifikasi dan penilaian risiko.

Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak terkait yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini.

1. Orang Tua Peneliti
2. Ibu Intan Nurrachmi
3. Ibu Nanik Eprianti
4. Ibu Liza Dzulhijjah Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Andika Persada Putera, Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan, (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Februari 2020), Volume 3 No..1 hlm 129
- [2] Naf'an, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019)
- [3] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- [4] Sutojo. Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus. (Jakarta: Damar Mulia Pustaka:2000)

- [5] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017.
- [6] Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.
- [7] Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm 35.
- [8] Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12.
- [9] Mardawi, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Perspektif Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm 10
- [10] Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014). hlm. 407
- [11] Ghina Safira Nurfikri, Febriadi, S. R., & Srisulisawati, P. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(1), 19–26. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.98>
- [12] Nurfadilah, F., & Rohmah Maulida, I. S. (2023). Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba terhadap Penggunaan Shopeepaylater ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 63–66. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1751>
- [13] Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>